



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 001a/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998**

V. PROPINSI JAWA TIMUR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 122/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0248/U/1985;
 - d. Nomor 0486/U/1992;
 - e. Nomor 0487/U/1992;
 - f. Nomor 0490/U/1992;
 - g. Nomor 0491/U/1992;
 - h. Nomor 054/U/1993;
 - i. Nomor 060/U/1993;
 - j. Nomor 061/U/1993;
 - k. Nomor 080/U/1993;
 - l. Nomor 0125/U/1994;
 - m. Nomor 002/U/1995;
 - n. Nomor 034/O/1997;
 - o. Nomor 035/O/1997;
 - p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

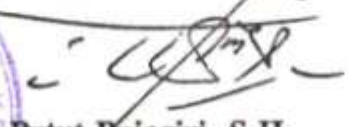
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.




Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	1	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	2	2	-	4	27
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	45
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	2	5	-	7	25
22.	BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	1	-	-	1	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	14
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	13
26.	BENGKULU	-	-	8	1	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH	44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
5.	JAWA TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Srengat	-	Srengat	Kabupaten Blitar	11.1.1.4236.23.01.05.5110 11.1.1.4236.23.01.05.5120 11.1.1.4236.23.01.05.5150
		2. TK Negeri Lumajang	-	Lumajang	Kabupaten Lumajang	11.1.1.4236.23.01.05.5210 11.1.1.4236.23.01.05.5220
		3. TK Negeri Kepanjen	-	Kepanjen	Kabupaten Malang	11.1.1.4236.23.01.05.5230 11.1.1.4236.23.01.05.5250 11.1.1.4236.23.01.05.5350
		4. TK Negeri Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	
		5. TK Negeri Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		6. SLTP Negeri 3 Doko	-	Doko	Kabupaten Blitar	11.1.1.4242.23.01.05.5110 11.1.1.4242.23.01.05.5120 11.1.1.4242.23.01.05.5150
		7. SLTP Negeri 2 Panggungrejo	-	Panggungrejo	Kabupaten Blitar	11.1.1.4242.23.01.05.5210 11.1.1.4242.28.01.05.5220
		8. SLTP Negeri 2 Blega	-	Blega	Kabupaten Bangkalan	11.1.1.4242.23.01.05.5230 11.1.1.4242.23.01.05.5250 11.1.1.4242.23.01.05.5350
		9. SLTP Negeri 2 Modung	-	Modung	Kabupaten Bangkalan	
		10. SLTP Negeri 2 Galis	-	Galis	Kabupaten Bangkalan	
		11. SLTP Negeri 2 Arosbaya	-	Arosbaya	Kabupaten Bangkalan	
		12. SLTP Negeri 2 Burneh	-	Burneh	Kabupaten Bangkalan	

1	2	3	4	5	6	7
		13. SLTP Negeri 2 Tegaldlimo	-	Tegaldlimo	Kabupaten Banyuwangi	
		14. SLTP Negeri 1 Kalipuro	-	Kalipuro	Kabupaten Banyuwangi	
		15. SLTP Negeri 3 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	
		16. SLTP Negeri 3 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
		17. SLTP Negeri 2 Grujugan	-	Grujugan	Kabupaten Bondowoso	
		18. SLTP Negeri 2 Sukosari	-	Sukosari	Kabupaten Bondowoso	
		19. SLTP Negeri 2 Cerme	-	Cerme	Kabupaten Bondowoso	
		20. SLTP Negeri 2 Kedungadem	-	Kedungadem	Kabupaten Bojonegoro	
		21. SLTP Negeri 3 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	
		22. SLTP Negeri 3 Balong Panggang	-	Balong Panggang	Kabupaten Gresik	
		23. SLTP Negeri 4 Sidayu	-	Sidayu	Kabupaten Gresik	
		24. SLTP Negeri 2 Gudo	-	Gudo	Kabupaten Jombang	

1	2	3	4	5	6	7
		25. SLTP Negeri 2 Jogoroto	-	Jogoroto	Kabupaten Jombang	
		26. SLTP Negeri 2 Panti	-	Panti	Kabupaten Jember	
		27. SLTP Negeri 3 Silo	-	Silo	Kabupaten Jember	
		28. SLTP Negeri 2 Sumberjambe	-	Sumberjambe	Kabupaten Jember	
		29. SLTP Negeri 2 Kandangan	-	Kandangan	Kabupaten Kediri	
		30. SLTP Negeri 2 Puncu	-	Puncu	Kabupaten Kediri	
		31. SLTP Negeri 3 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Lumajang	
		32. SLTP Negeri 2 Rowokangkung	-	Rowokangkung	Kabupaten Lumajang	
		33. SLTP Negeri 2 Tekung	-	Tekung	Kabupaten Lumajang	
		34. SLTP Negeri 2 Candipuro	-	Candipuro	Kabupaten Lumajang	
		35. SLTP Negeri 3 Tempeh	-	Tempeh	Kabupaten Lumajang	
		36. SLTP Negeri 2 Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	
		37. SLTP Negeri 4 Mejayan	-	Mejayan	Kabupaten Madiun	

1	2	3	4	5	6	7
		38. SLTP Negeri 4 Saradan	-	Saradan	Kabupaten Madiun	
		39. SLTP Negeri 2 Dagangan	-	Dagangan	Kabupaten Madiun	
		40. SLTP Negeri 2 Kare	-	Kare	Kabupaten Madiun	
		41. SLTP Negeri 3 Geger	-	Geger	Kabupaten Madiun	
		42. SLTP Negeri 2 Kutorejo	-	Kutorejo	Kabupaten Mojokerto	
		43. SLTP Negeri 3 Kutorejo	-	Kutorejo	Kabupaten Mojokerto	
		44. SLTP Negeri 2 Gedeg	-	Gedeg	Kabupaten Mojokerto	
		45. SLTP Negeri 2 Pakis	-	Pakis	Kabupaten Malang	
		46. SLTP Negeri 2 Donomulyo	-	Donomulyo	Kabupaten Malang	
		47. SLTP Negeri 2 Gondanglegi	-	Gondanglegi	Kabupaten Malang	
		48. SLTP Negeri 3 Sumbermanjing	-	Sumbermanjing	Kabupaten Malang	
		49. SLTP Negeri 2 Jabung	-	Jabung	Kabupaten Malang	
		50. SLTP Negeri 3 Kendal	-	Kendal	Kabupaten Ngawi	

1	2	3	4	5	6	7
		51. SLTP Negeri 2 Jatikalén	–	Jatikalén	Kabupaten Nganjuk	
		52. SLTP Negeri 2 Propo	–	Propo	Kabupaten Pamekasan	
		53. SLTP Negeri 2 Larangan	–	Larangan	Kabupaten Pamekasan	
		54. SLTP Negeri 2 Pegantenan	–	Pegantenan	Kabupaten Pamekasan	
		55. SLTP Negeri 2 Grati	–	Grati	Kabupaten Pasuruan	
		56. SLTP Negeri 2 Gondang Wetan	–	Gondang Wetan	Kabupaten Pasuruan	
		57. SLTP Negeri 2 Purwosari	–	Purwosari	Kabupaten Pasuruan	
		58. SLTP Negeri 2 Beji	–	Beji	Kabupaten Pasuruan	
		59. SLTP Negeri 2 Pasrepan	–	Pasrepan	Kabupaten Pasuruan	
		60. SLTP Negeri 3 Punung	–	Punung	Kabupaten Pacitan	
		61. SLTP Negeri 2 Sudimoro	–	Sudimoro	Kabupaten Pacitan	
		62. SLTP Negeri 3 Sudimoro	–	Sudimoro	Kabupaten Pacitan	
		63. SLTP Negeri 3 Tulakan	–	Tulakan	Kabupaten Pacitan	

1	2	3	4	5	6	7
		64. SLTP Negeri 2 Pringkuku	-	Pringkuku	Kabupaten Pacitan	
		65. SLTP Negeri 2 Pajarakan	-	Pajarakan	Kabupaten Probolinggo	
		66. SLTP Negeri 2 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
		67. SLTP Negeri 3 Gading	-	Gading	Kabupaten Probolinggo	
		68. SLTP Negeri 2 Wonomerto	-	Wonomerto	Kabupaten Probolinggo	
		69. SLTP Negeri 2 Kuripan	-	Kuripan	Kabupaten Probolinggo	
		70. SLTP Negeri 4 Sawoo	-	Sawoo	Kabupaten Ponorogo	
		71. SLTP Negeri 2 Pasongsongan	-	Pasongsongan	Kabupaten Sumenep	
		72. SLTP Negeri 2 Saronggi	-	Saronggi	Kabupaten Sumenep	
		73. SLTP Negeri 3 Sapeken	-	Sapeken	Kabupaten Sumenep	
		74. SLTP Negeri 2 Kendit	-	Kendit	Kabupaten Situbondo	
		75. SLTP Negeri 3 Asembagus	-	Asembagus	Kabupaten Situbondo	
		76. SLTP Negeri 2 Banyuglugur	-	Banyuglugur	Kabupaten Situbondo	

1	2	3	4	5	6	7
		77. SLTP Negeri 2 Jabon	—	Jabon	Kabupaten Sidoarjo	
		78. SLTP Negeri 2 Jrengik	—	Jrengik	Kabupaten Sampang	
		79. SLTP Negeri 2 Pakel	—	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		80. SLTP Negeri 2 Sumbergempol	—	Sumbergempol	Kabupaten Tulungagung	
		81. SLTP Negeri 3 Pagerwojo	—	Pagerwojo	Kabupaten Tulungagung	
		82. SLTP Negeri 2 Pogalan	—	Pogalan	Kabupaten Trenggalek	
		83. SLTP Negeri 3 Tugu	—	Tugu	Kabupaten Trenggalek	
		84. SLTP Negeri 2 Kampak	—	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		85. SLTP Negeri 3 Panggul	—	Panggul	Kabupaten Trenggalek	
		86. SLTP Negeri 3 Semanding	—	Semanding	Kabupaten Tuban	
		87. SLTP Negeri 3 Rengel	—	Rengel	Kabupaten Tuban	

1	2	3	4	5	6	7
		88. SMU Negeri 1 Jogoroto	-	Jogoroto	Kabupaten Jombang	11.1.2.4251.23.01.05.5110 11.1.2.4251.23.01.05.5120 11.1.2.4251.23.01.05.5150
		89. SMU Negeri 2 Batu	-	Batu	Kota Administratif Batu Kabupaten Malang	11.1.2.4251.23.01.05.5210 11.1.2.4251.23.01.05.5220 11.1.2.4251.23.01.05.5230
		90. SMU Negeri 1 Kedunggalar	-	Kedunggalar	Kabupaten Ngawi	11.1.2.4251.23.01.05.5250 11.1.2.4251.23.01.05.5350
		91. SMU Negeri 1 Bungkal	-	Bungkal	Kabupaten Ponorogo	
		92. SMU Negeri 1 Tulakan	-	Tulakan	Kabupaten Pacitan	
		93. SMU Negeri 1 Gapura	-	Gapura	Kabupaten Sumenep	

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Suai	—	Suai	Kabupaten Covalima	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 7 Dili	—	Dili Barat	Kota Administratif Dili Kabupaten Dili	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210
		3. SLTP Negeri 3 Lospalos	—	Lospalos	Kabupaten Lautem	11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

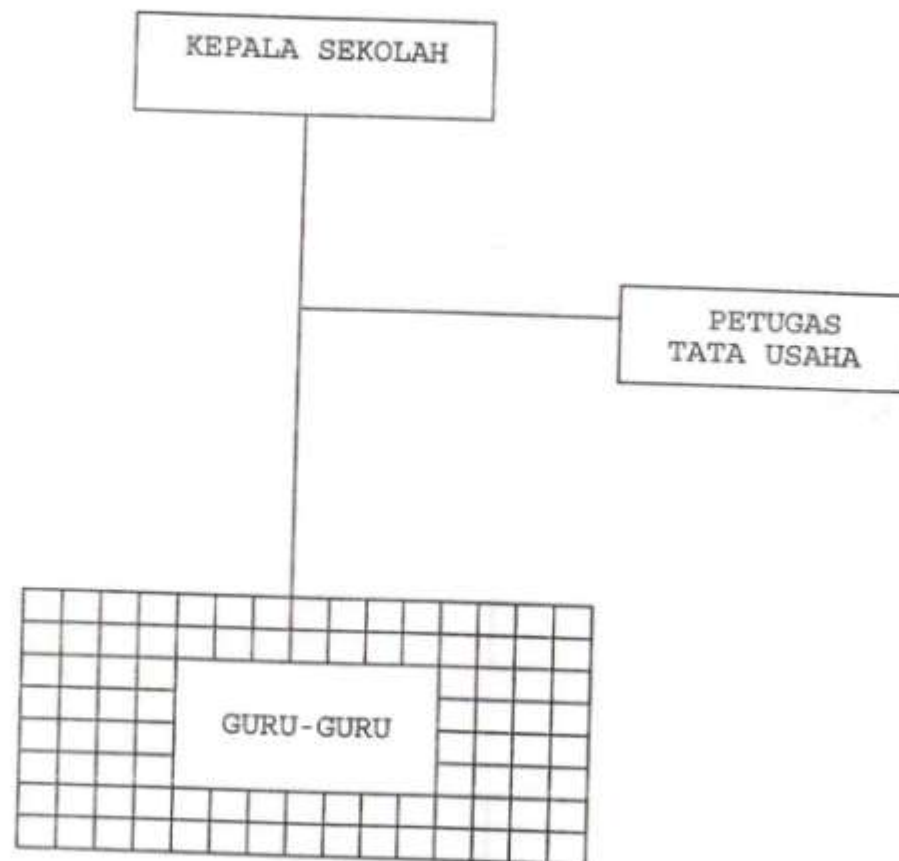
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan



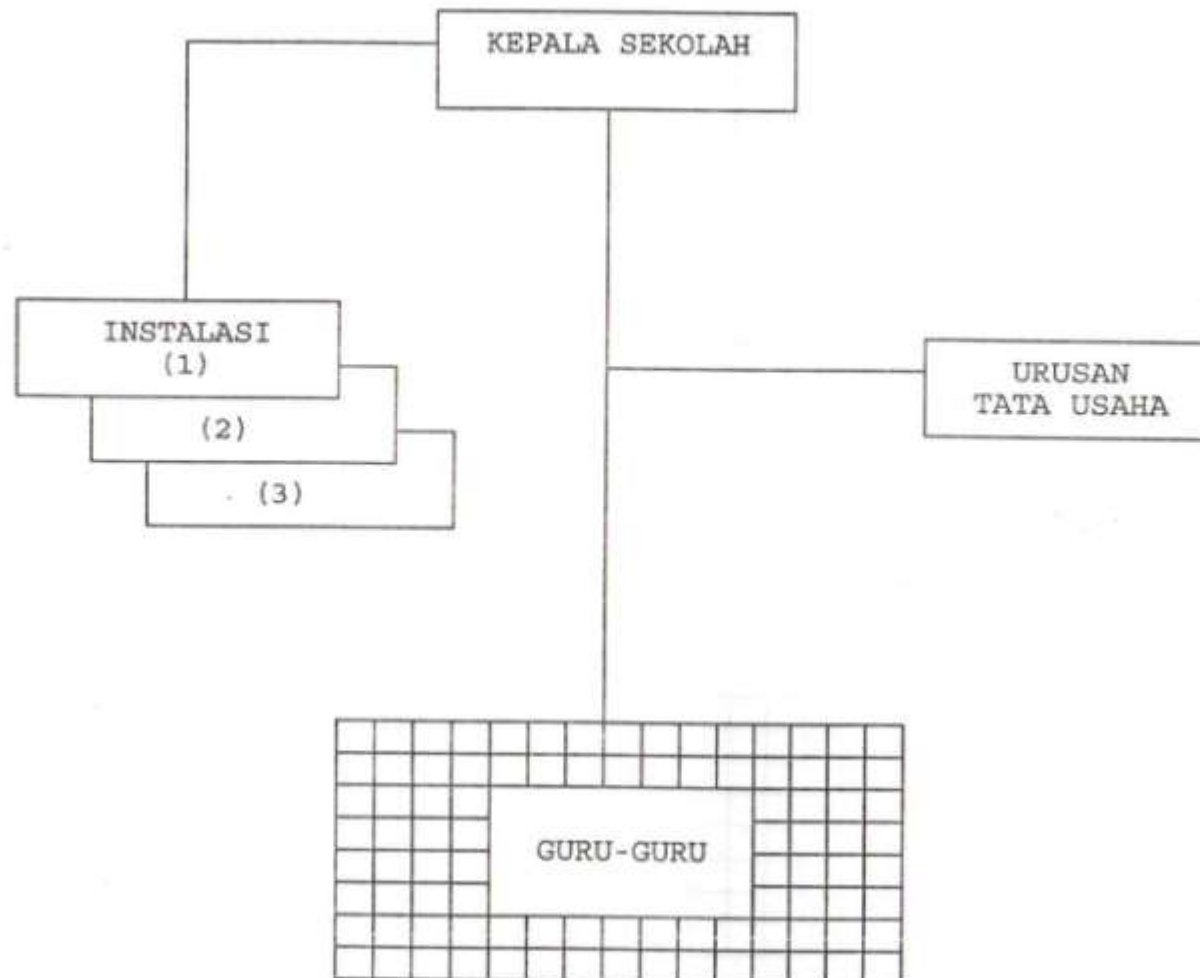
Putut Pujiogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

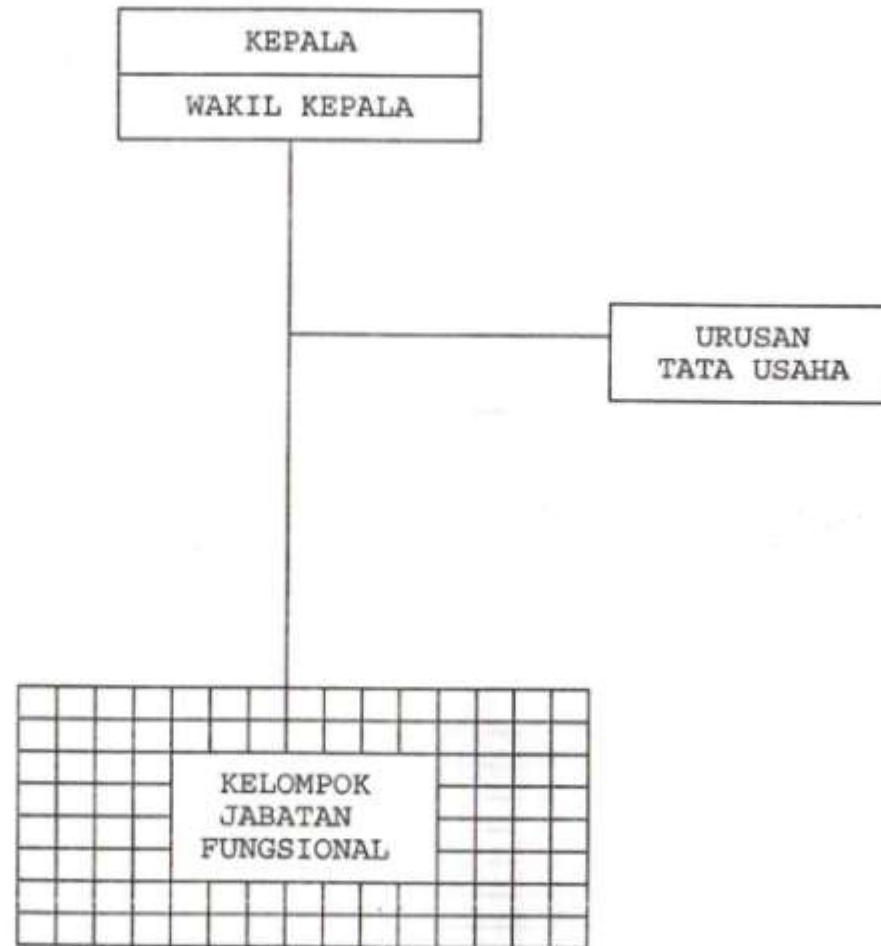
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



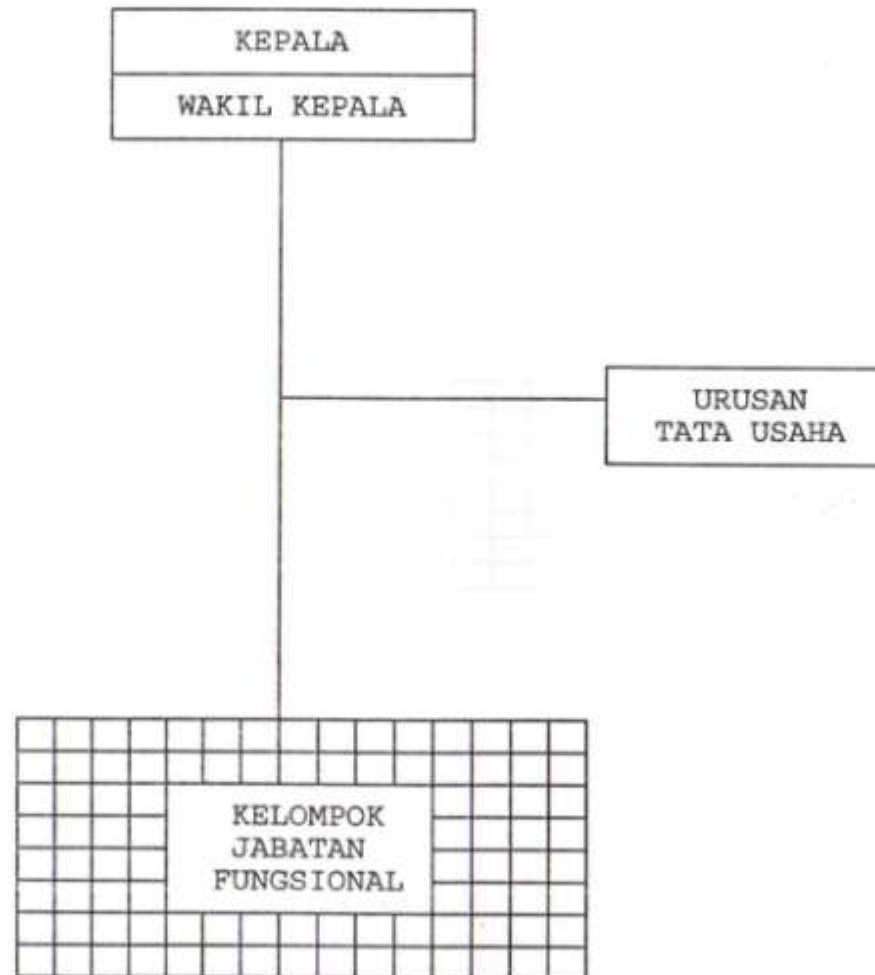
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



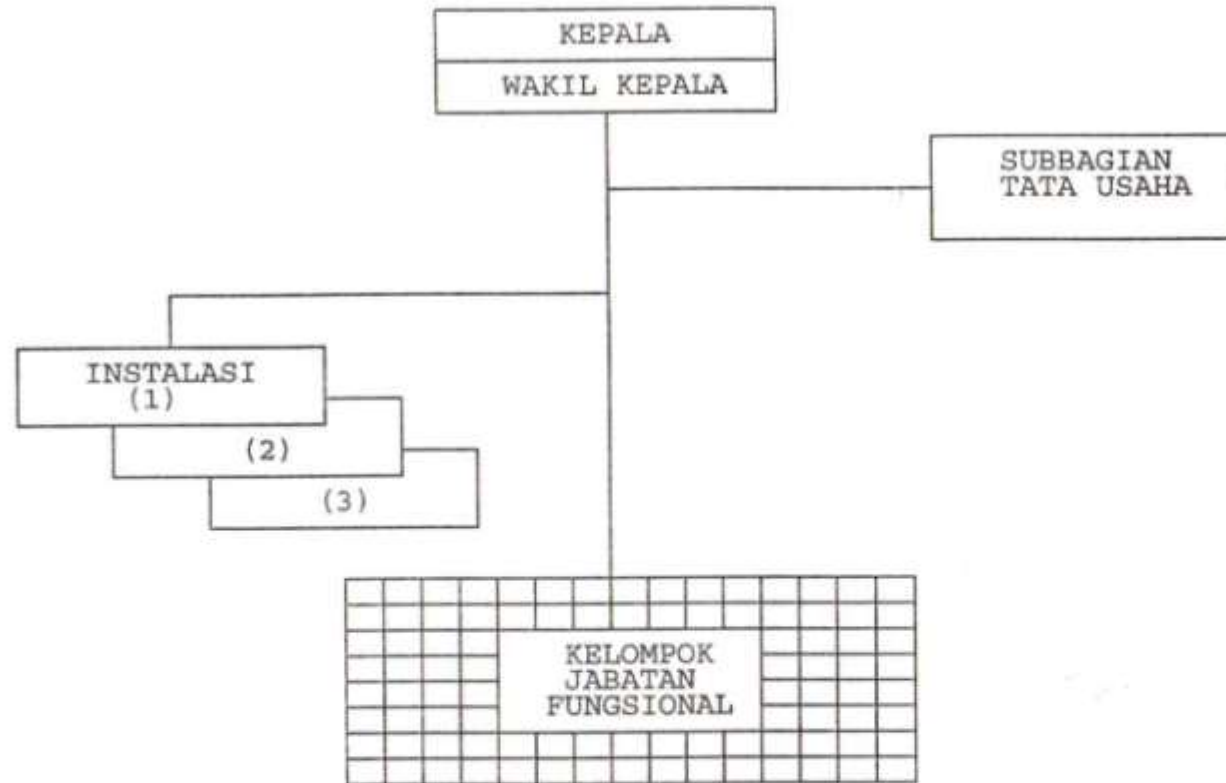
C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan



Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278